

Analisis Strategi Komunikasi Politik Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap 2025

Erik Ardiyanto, Ruth Stany Melisa

Universitas Paramadina, Kota Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author Email: erik.ardiyanto@paramadina.ac.id

Article History;

Submitted: 23 Maret 2025

Accepted: 25 Maret 2025,

Published: 26 Maret 2025

Kata kunci: Aktivisme Digital, Aksi Mahasiswa; Komunikasi Politik; Indonesia Gelap; Kritik Pemerintah

ABSTRAK

Aksi protes mahasiswa telah menjadi bagian penting dalam dinamika politik Indonesia. Perkembangan teknologi digital memungkinkan mahasiswa memanfaatkan media sosial sebagai sarana mobilisasi dan penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik mahasiswa dalam aksi "Indonesia Gelap" 2025, dengan fokus pada penggunaan media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan analisis konten media sosial serta wawancara dengan aktivis mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan narasi kritis dan simbol visual untuk menarik perhatian publik serta membangun solidaritas. Media sosial, terutama Instagram, Twitter, dan TikTok, menjadi sarana utama dalam mendistribusikan pesan aksi. Kesimpulannya, strategi komunikasi politik berbasis digital telah mengubah pola aksi mahasiswa dari demonstrasi fisik menjadi kampanye daring yang lebih luas dan efektif dalam membentuk opini publik.

Analysis of Students' Political Communication Strategy in Indonesia Dark 2025 Action

ABSTRACT

Student protests have become an important part of Indonesia's political dynamics. The development of digital technology allows students to use social media as a means of mobilization and delivery of criticism of government policies. This research aims to analyze students' political communication strategies in the "Dark Indonesia" 2025 action, focusing on the use of social media. The research method used is a qualitative approach with a case study, involving social media content analysis and interviews with student activists. The results showed that students used critical narratives and visual symbols to attract public attention and build solidarity. Social media, especially Instagram, Twitter, and TikTok, became the main means of distributing action messages. In conclusion, digital-based political communication strategies have changed the pattern of student actions from physical demonstrations to online campaigns that are more extensive and effective in shaping public opinion.

Keywords: Digital Digital Activis; Student Action; Political Communication; Dark Indonesia; Government Criticism

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



PENDAHULUAN

Aksi protes mahasiswa di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari dinamika politik nasional. Sejak era kemerdekaan hingga reformasi 1998, mahasiswa berperan dalam perubahan politik melalui demontsrasi. Perkembangan teknologi telah mengubah pola protes, dimana media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan pesan dan membangun popularitas.

Penelitian ini berangkat dari fenomena pemanfaatan media sosial dalam mobilisasi aksi “Indonesia Gelap” 2025. Mahasiswa menggunakan berbagai platform digital untuk Menyusun narasi public. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stratgei komunikasi politik mahasiswa dalam aksi ini, mengidentifikasi efektivitas media sosial dalam membangun opini public, serta memahami dinamika baru dalam aksi politik mahasiswa di Indonesia.

Setelahnya kurang lebih sepuluh tahun, aksi unjuk rasa mahasiswa dalam jumlah besar terjadi, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. Aksi unjuk rasa mahasiswa dipicu oleh keputusan pemerintah yang menaikkan harga minyak dan gas secara sepihak sehingga menyebabkan harga komoditas lainnya ikut naik dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.

Kemudian, rentan kurang lebih 9 tahun dinamika politik kembali terjadi di Indonesia

yang dipicu oleh penolakan terkait dengan revisi undang-undang RUU KUHP dan RUU KPK yang sedang dibahas dan akan disahkan oleh pemerintah Jokowi. Sehingga pada bulan September 2019, mahasiswa menggelar aksi besar di berbagai kota di Indonesia yang sebelumnya menunjukkan sikap apatis terhadap dinamika politik Indonesia (Ardiyanto, 2021).

Kemudian, hari ini kita menyaksikan di awal era kepemimpinan Prabowo Subianto aksi protes mahasiswa dalam jumlah besar juga terjadi di berbagai kota di Indonesia. Aksi Indonesia Gelap ini picu oleh beberapa kebijakan kontroversial pemerintah Prabowo dan pemerintahan sebelumnya di era Jokowi.

Dalam tuntutan mahasiswa meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait dengang pemangkasan anggaran pedidikan, program makan siang bergizi gratis, tunjangan kinerja dosen (tukin) yang belum cair, kabinet gemuk hingga program strategis nasional yang bermasalah (Imanudin Abdurohman, n.d.).

Mahasiswa juga menolak beberapa undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat undang-undang minerba dan batu bara yang memungkinkan kampus dapat mengelola tambang, serta upaya revisi RUU TNI dan Polri yang ditakuti oleh kalangan mahasiswa akan membangkitkan kembali Dwi fungsi ABRI yang memberikan kewenangan tentara aktif masuk kedalam jabatan - jabatan sipil yang menyebabkan konflik of interest.

Menurut Muridan S. Widjojo aksi

mahasiswa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu aksi moral dan aksi politik. aksi politik beranggapan bahwa perubahan politik dapat dicapai dengan cara mengingatkan para elit politik atau bahkan berusaha menumbangkan rezim yang sedang berkuasa. Sementara itu, aksi moral lebih fokus pada upaya untuk mengoreksi kondisi yang menimbulkan berbagai masalah sosial dan kejahatan moral dalam masyarakat.

Dengan demikian, aksi moral lebih terbatas pada fungsi memberikan peringatan atau himbauan kepada penguasa agar menjalankan tugasnya dengan benar. Penganut pandangan ini meyakini bahwa perubahan rezim dapat dilakukan melalui pengingat atau himbauan (Widjojo, 1999). Sedangkan evelsted & Toubol, mengatakan dalam setiap aksi dan aktivis harus mampu menggerakkan kemarahan moral terhadap ketidakadilan dan menyeimbangkan antara mobilisasi yang efektif tanpa jatuh ke dalam radikalisasi atau marginalisasi, agar dapat terus bertahan dan berpengaruh dalam membentuk tatanan moral masyarakat (Anders, 2023).

Meskipun aksi mahasiswa dari dulu hingga sekarang relatif mempunyai tujuan sama untuk membela kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan pemerintah. Tetapi yang membedakan adalah dari sisi strategi komunikasi politiknya, aksi mahasiswa sebelumnya, di era rezim Suharto misalnya menggunakan strategi komunikasi politik yang lebih radikal dan tersembunyi. Di

zaman ini mahasiswa menggunakan cara dengan mengorganize masyarakat dari bawah dan berkomunikasi ke berbagai kelompok masyarakat dan aksiya sifatnya lebih senyap dan tersembunyi.

Baru kemudian setelah terkonsolidasi dengan baik mulai melancarkan aksinya. Berbeda dengan aksi mahasiswa kali ini yang lebih masif dan terbuka. Kemudian sekarang mahasiswa banyak menggunakan saluran komunikasi media sosial dengan platform yang mereka bentuk secara daring sudah bisa menghubungkan isu dalam aksi secara masif. Kemudian kondisi sekarang mahasiswa lebih terbuka dan mudah dengan adanya platform aksi yang mereka bikin di media sosial untuk mengamplifikasi isu atau tuntutan yang akan mereka suarakan dalam aksi secara langsung.

Seiring dengan berkembangnya media sosial sebagai sarana komunikasi politik yang efektif, banyak aksi sosial dan aksi mahasiswa mulai memanfaatkannya untuk protes dan membentuk opini publik. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya kekuatan informasi politik, sehingga media sosial menjadi platform yang memungkinkan individu atau kelompok untuk melakukan aksi yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah (Sergiy Prokhorov, 2012). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan opini publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mencari dukungan atas apa yang disampaikan.

Dalam bukunya “Demokrasi

Deliberatif” Budi A Hardiman menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif adalah bentuk demokrasi yang menekankan pada proses diskusi dan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan politik (Hardiman, 2018). Dalam konteks ini, demokrasi deliberatif mengutamakan pertukaran argumen yang rasional dan terbuka dan inklusif. Demokrasi ini membutuhkan adanya ruang publik yang memungkinkan individu berpartisipasi aktif dan berdialog tentang isu-isu politik secara bebas dan terbuka. Dengan demikian, ruang publik dalam hal ini media sosial menjadi setara antara kekuasaan dan masyarakat tanpa adanya intervensi atau tekanan.

Dengan demikian peneliti ingin meneliti terkait dengan bagaimana Analisis Strategi Komunikasi Politik Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap 2025?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap aksi “Indonesia Gelap” 2025. Data dikumpulkan melalui analisis konten media sosial, wawancara mendalam dengan tiga aktivis mahasiswa, serta dokumentasi aksi dalam bentuk poster digital, foto, dan tangkapan layar video (Afdhal, Chatr; Komang, Ayu Henny, Achjar; Muhamad, Rusliyadi; A .Zaenurrosyid; Nini Apriani, Rumata; Iin, Nirwan;, Ayuliamita, 2023). Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola komunikasi

mahasiswa dalam membangun narasi aksi dan mempengaruhi opini publik

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus aksi mahasiswa Indonesia Gelap. Studi kasus dipilih karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana mahasiswa menggunakan strategi komunikasi politik di ruang digital untuk membentuk opini publik serta memobilisasi massa.

Rentang waktu pengumpulan data berlangsung dari 1 Februari 2025 hingga 9 Maret 2025, mencakup unggahan di Instagram, X (Twitter), dan TikTok yang berkaitan dengan aksi tersebut. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, membandingkan hasil wawancara dengan analisis media sosial serta laporan berita terkait.

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana aksi mahasiswa menggunakan strategi komunikasi politik di ruang digital dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan proses demokrasi deliberatif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran media sosial dalam aksi mahasiswa serta dampaknya bagi pemerintah dan partisipasi publik dalam politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksi “Indonesia Gelap” memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari aksi mahasiswa sebelumnya. Pertama penggunaan media sosial sebagai alat utama

dalam menyebarkan pesan protes. Mahasiswa lebih memilih identitas anonim atau menggunakan akun tidak terverifikasi untuk menghindari pengawasan. Dalam era digital ini, media sosial menjadi alat utama dalam menyuarakan ketidakpuasan dan memperjuangkan perubahan sosial. (Negara & Murlianti, 2023). Hastag seperti #IndonesiaGelap dan #TolakRUUTNI menjadi symbol perlawanan.

Visualisasi simbolik menjadi elemen kunci dalam komunikasi politik aksi ini. Contohnya adalah unggahan dengan visual Garuda Hitam bertuliskan “Peringatan Darurat” yang pertama kali muncul di akun Instagram Bangsa Mahardika pada 3 Februari 2025. Unggahan ini dikolaborasikan dengan akun Mahasiswa Bergerak dan Fraksi Rakyat Indonesia, yang mempercepat penyebaran pesan.

Strategi komunikasi mahasiswa dalam aksi ini lebih terbuka dibandingkan era sebelumnya. Jika era sebelumnya aksi mahasiswa lebih tertutup dan berbasis organisasi fisik, kini komunikasi digital memungkinkan penyebaran isu yang lebih cepat dan massif.

Media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi alat utama bagi mahasiswa untuk menyebarkan pesan protes mereka. Namun, aksi mahasiswa gelap lebih memilih untuk menggunakan identitas anonim atau menyebarkan konten melalui akun-akun yang tidak terverifikasi untuk menjaga kerahasiaan

dan menghindari pengawasan pemerintah. Hashtag seperti #Reformasi korupsi atau #SaveKPK sering kali muncul sebagai simbol aksi mahasiswa gelap di dunia maya (Apriyani, 2021).

Salah satu contoh nyata dari bagaimana media sosial menjadi pemicu aksi mahasiswa di era digital adalah unggahan dengan visual Garuda Hitam bertuliskan "Peringatan Darurat" yang pertama kali diunggah pada 3 Februari 2025 oleh akun Instagram Bangsa Mahardika. Postingan ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dikolaborasikan dengan dua akun lainnya, yaitu Mahasiswa Bergerak dan Fraksi Rakyat Indonesia, melalui fitur kolaborasi Instagram. Dengan demikian, unggahan tersebut langsung muncul di tiga akun dengan jumlah pengikut yang cukup besar, memungkinkan pesan yang disampaikan tersebar secara luas dalam waktu singkat.

Unggahan ini memiliki karakteristik visual yang kuat, dengan penggunaan warna monokrom yang dominan serta simbol Garuda Hitam, yang memberikan kesan genting dan darurat. Pesan yang ingin disampaikan jelas, yaitu menggambarkan situasi yang dianggap kritis oleh para aktivis. Dengan strategi ini, unggahan tersebut tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat mobilisasi yang efektif bagi mahasiswa dan masyarakat luas yang merasa terdampak oleh kebijakan pemerintah.



Gambar 1. Postingan Konten Garuda Hitam, Akun Media Sosial yang Mempublikasikan dan Komentar Masyarakat

(Sumber: Instagram @bangsamahardika, @mahasiswabergerak, @fraksirakyatindonesia)

Postingan "Garuda Hitam" mendapat respons positif dari masyarakat, yang terlihat dari banyaknya komentar yang mendukung aksi ini. Respon tersebut menunjukkan bahwa keresahan yang disuarakan dalam unggahan ini tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga oleh berbagai lapisan masyarakat lainnya. Salah satu komentar yang mencerminkan keresahan nyata terhadap kebijakan pemerintah datang dari akun @wave.i, yang menyatakan:

"Tolong perjuangkan hak rakyat ya! Geram banget soal LPG dan seluruh kebijakan aneh. Sampai ibu di rumah gue sepakat pemerintah ini kocak geming!"

Komentar ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait kenaikan harga LPG sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga. Komentar lain yang mencerminkan semangat perlawanan datang dari @fiqqoman, yang hanya menuliskan:

"Hanya 1 kata: LAWAN"

Hal ini menunjukkan bahwa banyak

masyarakat yang merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi kondisi saat ini adalah dengan melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Komentar dari @indralilim juga menarik perhatian, yang berbunyi:

"Kemarin biru sekarang hitam ada apa lagi ini?"

Komentar ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memperhatikan perubahan simbol dalam aksi ini, di mana sebelumnya digunakan warna biru, kemudian berganti menjadi hitam sebagai tanda eskalasi protes.

Selain itu, terdapat komentar dari akun @voiceone.dlm yang mengungkapkan keresahan dari perspektif kelompok masyarakat lain, yaitu:

"Sehat-sehat, panjang umur perjuangan. Saya titipkan kepada kalian, karena kami emak-emak pencari gas 3 kg, kami nggak bisa masak"

Komentar ini menunjukkan bahwa aksi yang awalnya dimobilisasi oleh mahasiswa ternyata mendapatkan resonansi dari kelompok yang lebih luas, termasuk ibu rumah tangga yang terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Dengan adanya keterlibatan berbagai lapisan masyarakat, aksi ini semakin kuat dan mendapatkan legitimasi lebih besar sebagai representasi keresahan publik.

Taktik ekstrem dalam aksi protes mahasiswa Indonesia sering kali mencakup penggunaan strategi mobilisasi yang agresif dan pembangkangan sipil. Dalam konteks ini, mahasiswa berupaya menarik perhatian publik dan pemerintah melalui aksi-aksi yang

lebih radikal, mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada (Syamsuddin, 2014). Aksi protes mahasiswa Indonesia gelap mengambil taktik yang lebih ekstrem, seperti penggunaan kekerasan dalam beberapa kejadian atau pemblokiran jalan, serta aksi yang lebih mendesak, yang bertujuan untuk menekan pemerintah atau pihak berwenang untuk memenuhi tuntutan mereka.



Gambar 2. Dokumentasi Mahasiswa Memblokir Jalan Menggunakan Beton Saat Aksi Indonesia Gelap (Sumber: CNBC Indonesia)

Dokumentasi yang ditampilkan oleh CNBC Indonesia menunjukkan mahasiswa yang memanjat barikade beton yang dipenuhi kawat berduri, memperlihatkan bagaimana mereka berupaya menduduki ruang-ruang strategis sebagai bentuk perlawanan. Aksi semacam ini bukan hanya sekadar simbol keberanian, tetapi juga strategi konkret untuk memperlihatkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah. Pemblokiran jalan dan pendudukan area-area vital menjadi cara mereka untuk menciptakan tekanan politik yang lebih besar, di mana akses publik yang terganggu menjadi alat efektif dalam menarik perhatian media serta meningkatkan urgensi isu yang diperjuangkan.

Di tengah protes yang berlangsung, mahasiswa juga harus berhadapan langsung dengan aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi demonstrasi. Ketegangan antara kedua pihak tidak jarang berujung pada konfrontasi fisik, di mana mahasiswa menggunakan strategi defensif seperti membangun barikade dari benda-benda di sekitar mereka, sementara di sisi lain, beberapa aksi juga menunjukkan kecenderungan ofensif dengan adanya lemparan benda ke arah aparat sebagai bentuk perlawanan. Fenomena ini semakin diperkuat dengan penggunaan identitas anonim oleh sebagian mahasiswa yang memilih menutup wajah mereka dengan masker atau kain. Hal ini bukan sekadar tindakan spontan, tetapi bagian dari strategi aksi mahasiswa gelap yang berupaya menghindari pengawasan dan represi dari pihak berwenang.

Isu-isu yang diangkat oleh aksi mahasiswa Indonesia gelap mencakup hal-hal yang dianggap kontroversial dan sensitif, Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah. Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.



Gambar 3. Mahasiswa Bersama Masyarakat Sipil Menggunakan Simbol dan Atribut dalam Aksi

(Sumber foto: Tribunnews, Antara, Kompas)

Aksi demonstrasi ini juga memperlihatkan bagaimana mahasiswa dan masyarakat sipil menggunakan simbol-simbol perlawanan yang kuat untuk menarik perhatian publik. Spanduk dengan tulisan "Indonesia Gelap" menjadi representasi dari kekecewaan mereka terhadap kondisi politik dan sosial yang semakin jauh dari harapan. Slogan-slogan lain yang terpampang di berbagai poster menunjukkan kritik tajam terhadap pemerintah, seperti "Efisiensi kok pendidikan? Makan noh mobil Mercy," yang menyiratkan sindiran terhadap kebijakan efisiensi yang justru tidak diterapkan secara adil. Poster lain yang bertuliskan "Makan dijanjikan, sekolah dikorbankan, masa depan dihancurkan" mencerminkan kekecewaan terhadap prioritas kebijakan yang lebih mengutamakan program populis dibandingkan investasi jangka panjang dalam sektor pendidikan.

Selain menyampaikan kritik melalui spanduk dan orasi, aksi ini juga menunjukkan tingkat mobilisasi yang tinggi di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil. Ribuan mahasiswa turun ke jalan dengan mengenakan

almamater mereka, membawa berbagai atribut protes, serta meneriakkan tuntutan secara kolektif. Massa aksi yang tumpah ruah di jalanan menunjukkan bahwa isu yang diangkat tidak hanya menjadi perhatian kelompok tertentu, tetapi juga telah membangkitkan kesadaran di kalangan mahasiswa dari berbagai kampus. Hal ini semakin menguatkan posisi aksi mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik yang mampu memberikan tekanan terhadap pemerintah.

Keberanian mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menyuarakan ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa peran mereka dalam dinamika politik Indonesia tidak bisa diremehkan. Mereka tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktor yang aktif dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Namun, di sisi lain, aksi ini juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghadapi tekanan dari aparat keamanan serta potensi polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Di tengah semakin kuatnya kendali negara terhadap ruang-ruang ekspresi publik, aksi mahasiswa terus berupaya mencari cara untuk tetap relevan dan efektif dalam menyuarakan aspirasi mereka.

Dalam aksi protes mahasiswa yang digambarkan sebagai "Indonesia gelap," komunikasi politik memainkan peran kunci dalam memobilisasi massa, mendistribusikan informasi, dan meningkatkan kesadaran politik. Dalam konteks aksi sosial dan

perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, strategi komunikasi politik menjadi elemen yang sangat penting. aksi "Indonesia Gelap" yang dimulai dari unggahan "Garuda Hitam" pada 3 Februari 2025 merupakan contoh bagaimana mahasiswa memanfaatkan komunikasi politik secara efektif untuk membangun narasi, membentuk opini publik, serta menggerakkan massa. Kemudian, penelitian *Aktivisme and Social Media: Youth Participation and Communication* menemukan bahwa kaum muda mengembangkan sistem komunikasi yang khas dalam aktivisme digital mereka. Mereka menggunakan kombinasi teks, simbol, dan meme untuk menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif. Bahasa yang digunakan cenderung lebih inklusif dan langsung, dengan tujuan memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu tertentu (Cortés-Ramos et al., 2021). Strategi komunikasi politik dalam aksi ini dapat dianalisis dari beberapa aspek utama, yaitu pesan yang disampaikan, aktor utama dalam komunikasi, media yang digunakan, dan dampak yang dihasilkan.

Pesan utama dalam aksi ini adalah "Peringatan Darurat," yang menggambarkan situasi krisis yang dianggap genting oleh mahasiswa. Penggunaan warna monokrom dan simbol Garuda Hitam memperkuat narasi bahwa negara sedang mengalami kondisi yang tidak stabil.

Kritik utama dalam aksi ini mencakup pemangkasan anggaran pendidikan, kenaikan

harga kebutuhan pokok, serta kebijakan strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat. Selain itu, pesan yang disampaikan dalam unggahan Indonesia Gelap bersifat provokatif tetapi tetap dalam batas wacana demokratis. Penggunaan warna monokrom, khususnya hitam, menciptakan efek visual yang memperkuat narasi bahwa kondisi negara sedang tidak baik-baik saja.



Gambar 4 Peringatan Darurat Garuda Gelap
(Sumber: Instagram @bangsamahardika)

Pesan dalam aksi ini juga menyiratkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang dianggap merugikan rakyat kecil, seperti kenaikan harga LPG dan pemangkasan anggaran pendidikan. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menanamkan urgensi perlawanan dengan menggunakan istilah "darurat", yang mendorong audiens untuk segera bertindak. Dari sisi linguistik, pesan yang digunakan dalam unggahan dan narasi aksi ini bersifat singkat, tajam, dan mudah diingat. Penggunaan kata seperti "Lawan!", "Ketar-ketir", dan "Selamatkan rakyat" di berbagai komentar menunjukkan bahwa pesan tersebut berhasil menciptakan semangat perlawanan dalam komunitas pendukung aksi.

Mahasiswa selalu berperan sebagai agen perubahan dalam aksi sosial dengan menginisiasi, menyebarluaskan, dan memimpin narasi perlawanan. Mereka berfungsi sebagai kekuatan moral yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengingat posisinya yang sering kali tanpa terikat pada kepentingan politik praktis. Hari ini, mahasiswa memainkan peran utama dalam aksi ini sebagai aktor komunikasi politik yang menginisiasi, menyebarluaskan, dan memimpin narasi perlawanan. Karena dalam sejarah aksi sosial di Indonesia, mahasiswa sering kali dianggap sebagai moral force atau kekuatan moral yang memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa kepentingan politik praktis.

Dalam aksi "Indonesia Gelap," mahasiswa bertindak sebagai:

- Penggagas dan pemantik diskusi publik, melalui unggahan media sosial yang memicu kesadaran politik masyarakat.
- Pemimpin opini, dengan menggunakan narasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan memperlihatkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
- Mediator antara rakyat dan pemerintah, dengan menyampaikan aspirasi yang dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, hingga akademisi.

Strategi komunikasi politik yang digunakan mahasiswa dalam aksi ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya

bertindak sebagai demonstran, tetapi juga sebagai komunikator politik yang membentuk narasi dan menggerakkan massa melalui media digital.

Dalam era digital, media sosial menjadi alat utama dalam strategi komunikasi politik aksi mahasiswa. Aksi "Indonesia Gelap" memanfaatkan Instagram sebagai media utama untuk menyebarluaskan pesan dan membangun kesadaran kolektif. Unggahan pertama kali dibuat oleh akun Bangsa Mahardika, kemudian dikolaborasikan dengan Mahasiswa Bergerak dan Fraksi Rakyat Indonesia. Strategi kolaborasi ini memperluas jangkauan pesan dengan lebih cepat dibandingkan metode komunikasi konvensional.

Media sosial menjadi alat utama dalam strategi komunikasi politik aksi mahasiswa. Platform utama yang digunakan meliputi:

- Instagram yang digunakan untuk menyebarkan unggahan visual dan poster digital.
- X (Twitter) berfungsi sebagai ruang diskusi dengan penggunaan tagar sebagai alat amplifikasi isu.
- TikTok untuk pemanfaatan format video pendek untuk menyebarkan narasi aksi yang lebih emosional dan viral.

Strategi komunikasi digital ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah beradaptasi dengan pola komunikasi politik modern, di mana kecepatan penyebaran informasi lebih penting dibandingkan

keterbatasan ruang fisik untuk bertemu secara langsung. Pendekatan komunikasi digital ini sejalan dengan penelitian Le Compte dan Klug yang menyatakan bahwa aktivis sosial di era digital memanfaatkan TikTok dan media sosial lainnya untuk membangun komunitas serta mendistribusikan pesan secara efektif (Compte & Klug, 2010).

Terbentuknya komunitas aktivisme sosial di TikTok, yang memberikan dukungan dan ruang diskusi bagi para aktivis serta memungkinkan kolaborasi untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Melalui interaksi dan keterlibatan dengan pengguna lain menjadi aspek kunci dalam strategi aktivisme digital, di mana aktivis tidak hanya menyampaikan pesan mereka, tetapi juga secara aktif menanggapi komentar, mengajak diskusi, serta menggunakan saran dari audiens untuk menciptakan konten yang lebih relevan.

Strategi komunikasi politik yang diterapkan dalam aksi ini terbukti efektif dalam memobilisasi massa. Hal ini dapat dilihat dari respon publik yang positif terhadap unggahan "Garuda Hitam", dengan banyaknya komentar yang menunjukkan dukungan terhadap aksi. Komentar-komentar seperti "Hanya 1 kata: LAWAN", dan "Tolong perjuangkan hak rakyat ya!" menunjukkan bahwa narasi yang dibangun oleh mahasiswa telah berhasil menciptakan keterlibatan emosional di kalangan masyarakat luas.

Efektivitas strategi komunikasi politik dalam aksi ini terlihat dari besarnya respons

publik terhadap unggahan "Garuda Hitam." Banyak komentar di media sosial menunjukkan keterlibatan emosional masyarakat, termasuk kelompok ibu rumah tangga dan pekerja yang turut merasakan dampak kebijakan pemerintah. Mobilisasi digital ini memungkinkan aksi mahasiswa menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan aksi fisik konvensional. Dalam komunikasi politik, keberhasilan suatu aksi tidak hanya diukur dari jumlah massa yang turun ke jalan, tetapi juga dari bagaimana narasi tersebut mampu mempengaruhi opini publik dan menggeser wacana politik yang ada. Dalam konteks ini, mahasiswa berhasil menciptakan momentum politik melalui strategi komunikasi yang terstruktur dan berbasis digital.

Aksi "Indonesia Gelap" merupakan contoh bagaimana mahasiswa menggunakan strategi komunikasi politik yang efektif dalam membangun narasi dan memobilisasi massa. Pesan yang disampaikan dalam unggahan "Garuda Hitam" menggunakan pendekatan singkat, tajam, dan simbolik, sehingga mampu menarik perhatian publik dalam waktu singkat.

Mahasiswa dalam aksi ini tidak hanya bertindak sebagai demonstran, tetapi juga sebagai komunikator politik yang membangun opini publik melalui media sosial. Dengan strategi kolaborasi antar akun besar, penyebaran narasi menjadi lebih luas dan cepat. Keberhasilan aksi ini dalam menarik perhatian masyarakat menunjukkan

bahwa media sosial telah menjadi medan baru dalam perjuangan politik dan aktivisme. Dengan menggunakan pendekatan digital yang tepat, mahasiswa mampu mengubah strategi perlawanan dari sekadar demonstrasi fisik menjadi kampanye digital yang memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran politik publik. Dengan demikian, aksi "Indonesia Gelap" bukan hanya sekedar aksi protes, tetapi juga sebuah model baru dalam strategi komunikasi politik di era digital, di mana narasi yang kuat dan distribusi pesan yang cepat dapat menciptakan peraksi yang masif dan berdampak luas.

Aksi aksi mahasiswa Indonesia gelap mempunyai dua implikasi signifikan terhadap demokrasi dan stabilitas politik Indonesia. Pertama, aksi ini mendorong peningkatan partisipasi politik terutama di kalangan generasi muda, dengan munculnya aksi mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, aksi ini juga membuktikan tumbuhnya kesadaran politik dan aksi sipil yang semakin berkembang di masyarakat, menunjukkan bahwa lebih banyak individu kini terlibat aktif dalam memperjuangkan perubahan sosial dan politik. Sehingga pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan tidak bisa lagi didasari hanya kepentingan sesaat atau golongan saja, karena masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan di tengah kosong oposisi dari partai politik. Namun, aksi ini juga dituduh oleh pemerintah dapat

memperburuk polarisasi sosial dengan menggunakan narasi provokatif dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Bahkan, aksi mahasiswa Indonesia gelap dinilai terlalu ekstrem dengan kekerasan dan pemblokiran jalan dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan. Para Pendukung pemerintah juga khawatir aksi ini juga dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara dan memperlemah legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Untuk mengetahui lebih dalam motif dan alasan sebenarnya mahasiswa melakukan demonstrasi kita berhasil melakukan wawancara dengan mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Berikut adalah hasil dari wawancara dengan tiga narasumber mahasiswa yang mengikuti aksi Indonesia gelap.

Pertama kita menanyakan pandangan umum terkait dengan konteks dinamika politik pemerintahan Prabowo dan Gibran. Menurut Narasumber 1, aksi "Indonesia Gelap" merupakan akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat semakin pesimis terhadap arah masa depan negara karena berbagai kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat.

"Seolah-olah Indonesia tidak memiliki titik terang ke depan. Isu-isu yang beredar justru semakin mengecewakan masyarakat, seperti korupsi yang semakin terbuka dan kebijakan publik yang jauh dari nilai partisipatif serta

kesejahteraan masyarakat. Efisiensi memang penting, tapi kalau anggaran pendidikan justru dipangkas, termasuk tunjangan dosen, lalu bagaimana masa depan generasi penerus?" (Narasumber 1)

Sedangkan, Narasumber 2 menambahkan bahwa aksi ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang memicu ketidakpuasan, terutama di kalangan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.

"Ada tren 'kabur aja dulu' di mana masyarakat, terutama mahasiswa, merasa tidak memiliki harapan terhadap negara. Salah satu pemicu utamanya adalah kebocoran data efisiensi anggaran pendidikan tinggi yang akhirnya diketahui publik. Ketika pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas malah dianggap sebagai beban anggaran, ini mencerminkan bahwa negara seakan pesimis terhadap masa depan pendidikannya sendiri." (Narasumber 2)

Kemudian, Narasumber 3 lebih menjelaskan bahwa sebelum memperjuangkan suatu isu sosial, ada tahapan konsolidasi yang harus dilakukan.

"Biasanya kami mengadakan konsolidasi eksternal terlebih dahulu, misalnya dengan kampus-kampus di Jabodetabek. Setelah ada kesepakatan bersama, barulah kami melakukan konsolidasi internal dengan civitas akademik kampus. Ini penting agar aksi yang dilakukan lebih terorganisir dan memiliki dasar yang kuat." (Narasumber 3)

Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan baru dalam perjuangan isu sosial, terutama terkait media yang sudah banyak terafiliasi dengan partai politik.

"Media yang sudah terafiliasi dengan partai politik menjadi tantangan baru bagi kami dalam mencari informasi yang objektif. Maka dari itu, kami berupaya mencari data riset

yang lebih kredibel untuk memperkuat argumentasi aksi." (Narasumber 3)

Yang kedua kita menanyakan apa motif mahasiswa bergabung dengan Aksi Indonesia Gelap. Menariknya disini, Baik Narasumber 1, Narasumber 2, maupun Narasumber 3 sepakat bahwa motivasi utama bergabung dalam aksi ini adalah keresahan yang sudah dirasakan secara langsung.

"Kita gak bisa diam saja melihat kondisi ini. Ketika harga gas naik, orang tua saya kesulitan memasak. Banyak teman-teman saya juga merasakan dampak dari pemutusan hubungan kerja di mana orang tua mereka kehilangan pekerjaan. Keresahan ini milik kita bersama, makanya saya merasa harus bersuara." (Narasumber 1)

Sedangkan, Narasumber 2 menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar aksi mahasiswa, tetapi aksi rakyat secara keseluruhan.

"Banyak orang berpikir bahwa aksi ini hanya aksi mahasiswa. Padahal, kita turun ke jalan karena kita juga bagian dari rakyat. Ibu dan bapak kita juga merasakan kesulitan yang sama. Mahasiswa bukan sekadar mewakili diri sendiri, tapi membawa suara rakyat yang lebih luas." (Narasumber 2)

Kemudian, Narasumber 3 menambahkan bahwa motivasi utamanya adalah demi keadilan rakyat.

"Motivasi utama saya adalah rakyat dan keadilan bagi rakyat. Terkadang pemerintah meluncurkan aturan yang justru merugikan rakyat. Ketika kami, sebagai mahasiswa, merasa bahwa kebijakan itu hanya membawa kerugian, maka kami tanamkan jiwa keadilan untuk memperjuangkan hak seluruh rakyat Indonesia." (Narasumber 3)

Peran media sosial dalam komunikasi

politik di era digital di negara demokrasi tidak terlepas dari pemahaman demokrasi sebagai bentuk kesepakatan untuk mengatur kepentingan dalam pengambilan keputusan. Media sosial, dalam konteks demokrasi global, menjadi sarana baru bagi individu untuk berpartisipasi sebagai warga negara di dunia maya (*netizen*) dan memberikan kontribusi dalam pemerintahan. Dalam ranah *cyberspace*, warga negara dapat menyampaikan pendapat mereka secara bebas sebagai bagian dari publik (Hidayah et al., 2020). Ketiga kita menanyakan bagaimana peran media sosial dalam aksi Indonesia Gelap. Menurutnya, dalam era digital, peran media sosial sangat signifikan dalam memobilisasi aksi sosial. Narasumber 1 menyebutkan bahwa media sosial seperti TikTok dan Instagram menjadi alat efektif dalam menyebarkan isu.

"Saat ini kita punya cara-cara baru untuk menyampaikan pesan. Kalau dulu aksi sosial hanya melalui aksi fisik, sekarang kita bisa menyebarkan pesan lebih luas lewat media sosial. Kampanye digital sangat efektif untuk mengadvokasi isu-isu nasional." (Narasumber 1)

Namun, ia juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki keterbatasan.

"Media sosial memang bagus untuk menyebarkan isu dengan cepat, tapi tidak selalu bisa menggali substansi lebih dalam. Makanya, kita tetap harus ada konsolidasi langsung agar aksi ini tidak hanya berhenti di media sosial." (Narasumber 1)

Kemudian, Narasumber 3 menambahkan bahwa mereka biasanya

menggunakan media sosial sebagai tahap awal sebelum turun ke jalan.

"Karena sekarang masifnya penggunaan media sosial, kami biasanya menyampaikan pesan melalui media terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kami turun ke jalan dengan melakukan demonstrasi." (Narasumber 3)

Namun, ia juga mencatat dampak negatif dari media sosial yang dapat memperburuk situasi.

"Salah satu dampak negatifnya adalah banyak masyarakat yang langsung percaya pada informasi yang tidak sesuai dengan data. Misalnya, potongan video yang dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat percaya tanpa melakukan validasi terhadap berita tersebut." (Narasumber 3)

Kemudian yang terakhir kita menanyakan terkait dengan tanggapan terhadap tuduhan bahwa aksi Indonesia gelap ini telah mengancam stabilitas politik. Terkait anggapan bahwa aksi ini mengancam stabilitas politik dan keamanan negara, Narasumber 1 menilai bahwa hal tersebut hanyalah bentuk ekspresi kemarahan masyarakat.

"Meskipun aksi ini besar, saya rasa tidak sampai mengganggu stabilitas negara. Ini hanyalah akumulasi kemarahan dan kekecewaan masyarakat yang ingin disuarakan." (Narasumber 1)

Sedangkan Narasumber 3 menilai bahwa anggapan tersebut justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola negara.

"Saya tidak masalah dengan asumsi bahwa aksi ini mengancam stabilitas. Karena ketika masyarakat sudah merasakan hal tersebut, itu berarti pemerintah memang tidak becus

mengurus negara. Solusinya mungkin dengan memperbanyak kajian isu yang mendalam agar aksi ini memiliki landasan yang kuat."(Narasumber 3)

SIMPULAN

Komunikasi politik dalam aksi "Indonesia Gelap" menunjukkan bahwa mahasiswa telah beradaptasi dengan pola aktivisme baru yang lebih digital dan terbuka. Strategi komunikasi yang digunakan berhasil membangun narasi politik yang kuat, memobilisasi massa, dan memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran media sosial dalam komunikasi politik mahasiswa, serta bagaimana strategi digital dapat digunakan sebagai alat perjuangan politik. Di masa depan, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana aksi mahasiswa di ruang digital dapat direspons oleh pemerintah dan media arus utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Chatr; Komang, Ayu Henny, Achjar; Muhamad, Rusliyadi; A .Zaenurrosyid; Nini Apriani, Rumata; Iin, Nirwan;, Ayuliamita, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anders, S. (2023). *Values, Activism and Changing Attitudes: Individual-Level Moral Development in Social Movement Contexts*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98798-5_5
- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital (The Role of Social Media in Mass Protest Movements and New

Democracy in the Digital Age). *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17–30. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc/article/view/31-02/1461>

- Ardiyanto, E. (2021). Political Communications in the Public Sphere Student Protest in Indonesia 2019-2020. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(2), 229–241. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v6i2.589>
- Compte, D. Le, & Klug, D. (2010). “It ’s Viral !” - A study of the behaviors , practices , and motivations of TikTok Social Activists. 108–111.
- Cortés-Ramos, A., Torrecilla García, J. A., Landa-Blanco, M., Poleo Gutiérrez, F. J., & Castilla Mesa, M. T. (2021). Activism and social media: Youth participation and communication. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810485>
- Hardiman, B. (2018). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Hidayah, Y., Sapriya, S., Darmawan, C., & Malihah, E. (2020). Protes Sosial Dalam Komunikasi Politik di Era Digital Melalui Civic Community Pada mahasiswa. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(1), 220. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.1964>
- Imanudin Abdurrohman. (n.d.). *Makna Indonesia Gelap yang Viral di Medsos, Apa Isi Tuntutannya?* Retrieved June 5, 2025, from <https://tirto.id/makna-indonesia-gelap-yang-viral-di-medsos-apa-isi-tuntutannya-g71w>
- Negara, P., & Murlianti, S. (2023). *STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MOBILISASI GERAKAN MAHASISWA DI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN Abstrak Dilihat dari rentetan gerakannya , dimulai dari sebab hingga sampai gerakan aksi tersebut tentu kita akan melihat bahwa mahasiswalah yang memang memiliki andil*. 11(3), 36–46. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/07/JURNAL PANCA NEGARA 2016 GENAP1 \(07-20-23-04-43-44\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/07/JURNAL PANCA NEGARA 2016 GENAP1 (07-20-23-04-43-44).pdf)
- Sergiy Prokhorov. (2012). *Facebook as a Tool for the Establishment of Democracy in Egypt* [Malmo University]. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1482268/FULLTEXT01>
- Syamsuddin, R. R. H. (2014). *GMNI dan HMI*

dalam Politik Kekuasaan. Penerbit

Nagamedia.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NNmuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Syamsudin+Rajab,+%26+Ade+Reza+Hariadi.+\(2014\).+GMNI+dan+HMI+dalam+Politik+Kekuasaan.+Penerbit+Nagamedia&ots=6jr_Ak8DqQ&sig=4nInQIvZgWb8zGCv2emWT8vDThs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fa](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NNmuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Syamsudin+Rajab,+%26+Ade+Reza+Hariadi.+(2014).+GMNI+dan+HMI+dalam+Politik+Kekuasaan.+Penerbit+Nagamedia&ots=6jr_Ak8DqQ&sig=4nInQIvZgWb8zGCv2emWT8vDThs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fa)

Widjojo, M. S. (1999).

Penakluk Rezim Orde Baru, aksi Mahasiswa '98. Pustaka Sinar Harapan.